ABDI NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume 2, Nomor 3, Agustus 2026
E-ISSN 3089-5111 | P-ISSN 3089-512X
Website: https://ejurnal.edumedia.or.id/abdinusantara
Email: abdinusantara@ejurnal.edumedia.or.id

Model Pengelolaan Sekolah Unggul Berbasis Siklus PPEPP melalui Pendampingan Penguatan Budaya Mutu Berkelanjutan

A Model for Managing High-Performing Schools Based on the PPEPP Cycle through Mentoring to Strengthen a Sustainable Quality Culture

Amron[1], Heriyanto[2], M. Syadeli Hanafi[3]
Universitas Bina Bangsa[1,2,3]
Email Korespondensi: amron02@gmail.com✉

Histori Artikel
Masuk: 06-07-2026 | Diterima: 20-08-2026 | Diterbitkan: 25-08-2026

Abstrak

Penguatan budaya mutu pada satuan pendidikan merupakan kebutuhan strategis dalam mewujudkan pengelolaan sekolah yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. Namun, implementasi penjaminan mutu di sekolah masih menghadapi tantangan berupa belum optimalnya keterpaduan antara penetapan standar, pelaksanaan program, evaluasi berbasis data, pengendalian, dan tindak lanjut peningkatan mutu. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk mendampingi SMP Negeri 6 Cilegon dalam memperkuat pengelolaan sekolah berbasis siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) serta membangun budaya mutu berkelanjutan. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif melalui identifikasi kebutuhan, sosialisasi konsep PPEPP, pendampingan penyusunan dan pemetaan standar mutu, implementasi siklus PPEPP, monitoring, evaluasi, serta refleksi dan tindak lanjut. Mitra kegiatan meliputi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS), guru, dan tenaga kependidikan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan keterlibatan warga sekolah dalam menerapkan siklus PPEPP secara lebih sistematis. Pendampingan mendorong sekolah untuk memperkuat perencanaan berbasis standar mutu, melaksanakan program berdasarkan indikator yang terukur, menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar pengendalian, serta menyusun tindak lanjut peningkatan mutu secara berkelanjutan. Kegiatan juga memperkuat kolaborasi, akuntabilitas, profesionalisme, dan budaya refleksi warga sekolah. Dengan demikian, pendampingan pengelolaan sekolah berbasis siklus PPEPP dapat menjadi strategi praktis dalam memperkuat kapasitas sekolah dan membangun budaya mutu yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Pengelolaan Sekolah; PPEPP; Budaya Mutu; Penjaminan Mutu Pendidikan.

Abstract

Strengthening a quality culture in educational institutions is a strategic imperative for achieving effective, accountable, and sustainable school management. However, the implementation of quality assurance in schools still faces challenges, particularly the lack of integration among standard setting, program implementation, data-based evaluation, control, and continuous quality improvement. This Community Service (PkM) program aimed to assist SMP Negeri 6 Cilegon in strengthening school management through the cycle of Standard Setting, Implementation, Evaluation, Control, and Improvement (PPEPP) and in fostering a sustainable quality culture. The program employed a participatory approach consisting of needs identification, dissemination of the PPEPP concept, assistance in developing and mapping quality standards, implementation of the PPEPP cycle, monitoring and evaluation, reflection, and follow-up actions. The participating partners included the principal, vice principals, the School Education Quality Assurance Team (TPMPS), teachers, and educational staff. The results indicated increased understanding and engagement among school stakeholders in implementing the PPEPP cycle more systematically. The mentoring process encouraged the school to strengthen quality-standard-based planning, implement programs based on measurable indicators, utilize evaluation findings as a basis for quality control, and formulate follow-up actions for continuous quality improvement. The program also enhanced collaboration, accountability, professionalism, and a reflective culture among school stakeholders. These findings suggest that mentoring in school management based on the PPEPP cycle can serve as a practical strategy for strengthening institutional capacity and fostering a sustainable quality culture.

Keywords: School Management; PPEPP; Quality Culture; Educational Quality Assurance.

This is an open acacess article under the CC BY-SA license

PENDAHULUAN

Peningkatan mutu pendidikan merupakan kebutuhan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan abad ke-21. Sekolah dituntut tidak hanya menghasilkan peserta didik yang memiliki kompetensi akademik dan karakter yang baik, tetapi juga mampu menyelenggarakan layanan pendidikan secara efektif, akuntabel, adaptif, dan berkelanjutan. Tuntutan tersebut membutuhkan sistem pengelolaan sekolah yang mampu memastikan bahwa setiap program dirancang berdasarkan kebutuhan, dilaksanakan sesuai standar, dievaluasi menggunakan data, dikendalikan melalui tindak lanjut, dan ditingkatkan secara berkelanjutan. (Pater et al., 2020) menunjukkan bahwa implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) memiliki keterkaitan dengan upaya mewujudkan budaya mutu di satuan pendidikan. Hasil evaluasi mereka juga menunjukkan bahwa pelaksanaan SPMI perlu didukung oleh sumber daya, pengelolaan, serta mekanisme tindak lanjut yang memadai.

Dalam konteks penjaminan mutu pendidikan, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan mekanisme yang memungkinkan satuan pendidikan mengenali kondisi mutunya, merencanakan perbaikan, melaksanakan program, melakukan evaluasi, serta melakukan pengendalian dan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Laman resmi Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menjelaskan bahwa SPMI berfokus pada penguatan kapasitas internal satuan pendidikan untuk mengenali, merencanakan, dan meningkatkan mutu secara mandiri dan berkelanjutan serta diarahkan untuk mewujudkan budaya mutu di satuan pendidikan. Oleh karena itu, siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) dapat ditempatkan sebagai kerangka manajerial yang membantu sekolah memastikan bahwa proses peningkatan mutu berlangsung secara sistematis dan berkesinambungan.

Sekolah unggul pada dasarnya bukan hanya sekolah yang memiliki prestasi akademik dan nonakademik tinggi, tetapi sekolah yang mampu membangun sistem pengelolaan yang konsisten dalam menjaga dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Budaya mutu menjadi salah satu fondasi penting karena mendorong warga sekolah untuk menjadikan kualitas sebagai bagian dari kebiasaan kerja, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan program. (Solowati et al., 2025) menunjukkan bahwa pengembangan budaya mutu di sekolah berkaitan dengan penguatan visi dan misi, kepemimpinan yang adaptif dan kolaboratif, pengembangan kompetensi guru, keterlibatan pemangku kepentingan, serta evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa budaya mutu tidak cukup dibangun melalui kebijakan formal, tetapi perlu diwujudkan melalui praktik pengelolaan sekolah yang konsisten dan melibatkan seluruh warga sekolah.

Penguatan budaya mutu juga membutuhkan kepemimpinan sekolah yang mampu menggerakkan warga sekolah untuk berkolaborasi, menggunakan data dalam pengambilan keputusan, dan menjadikan evaluasi sebagai dasar perbaikan. Basuki, Rahmawati, Santoso, dan Huda (2026) dalam kajian sistematis mengenai kepemimpinan kepala sekolah menunjukkan bahwa kepemimpinan sekolah merupakan salah satu unsur sentral yang menghubungkan kinerja guru, pengelolaan berbasis sekolah, strategi mutu, dan terbentuknya budaya yang berorientasi pada kualitas. Dengan demikian, penerapan PPEPP perlu dipahami bukan sekadar sebagai prosedur administratif, tetapi sebagai mekanisme yang dapat memperkuat kepemimpinan, kolaborasi, refleksi, dan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan sekolah.

SMP Negeri 6 Cilegon sebagai satuan pendidikan jenjang sekolah menengah pertama memiliki potensi dan komitmen untuk terus meningkatkan mutu layanan pendidikan melalui berbagai program akademik, pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, penguatan karakter peserta didik, pemanfaatan teknologi, serta pengembangan sarana dan prasarana. Namun, berdasarkan identifikasi awal kebutuhan mitra, masih terdapat kebutuhan untuk memperkuat keterpaduan antara perencanaan program, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan tindak lanjut

peningkatan mutu. Beberapa proses peningkatan mutu berpotensi berjalan secara parsial karena belum seluruhnya dipahami dan dilaksanakan sebagai satu siklus yang utuh. Evaluasi program juga perlu semakin diarahkan pada pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan keputusan, sedangkan hasil evaluasi perlu diterjemahkan secara konsisten menjadi rencana tindak lanjut dan program peningkatan berikutnya.

Permasalahan tersebut memiliki relevansi dengan temuan (Purnamasari, 2026) yang mengidentifikasi bahwa salah satu persoalan dalam peningkatan mutu sekolah adalah belum optimalnya pemanfaatan penjaminan mutu internal sebagai instrumen perencanaan berbasis data. Ketika penjaminan mutu lebih dipandang sebagai kewajiban administratif, potensi SPMI sebagai mekanisme untuk mengidentifikasi kebutuhan dan merancang peningkatan mutu secara sistematis menjadi belum maksimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan kapasitas warga sekolah menjadi aspek penting dalam memastikan SPMI dan siklus PPEPP benar-benar digunakan sebagai instrumen peningkatan mutu, bukan hanya sebagai pemenuhan dokumen administratif.

Kondisi tersebut apabila tidak diperkuat dapat menyebabkan kegiatan peningkatan mutu bersifat administratif dan insidental, sehingga hasil evaluasi belum sepenuhnya menjadi dasar bagi perbaikan program berikutnya. Selain itu, ketidakterpaduan proses PPEPP dapat menyebabkan pengalaman, praktik baik, dan hasil evaluasi yang telah diperoleh sekolah belum terdokumentasi dan dimanfaatkan secara optimal sebagai pengetahuan organisasi. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menghambat terbentuknya budaya mutu yang menjadikan refleksi, evaluasi, kolaborasi, dan perbaikan sebagai kebiasaan seluruh warga sekolah. (Budaya et al., 2017) menegaskan bahwa penerapan siklus SPMI pada satuan pendidikan diarahkan untuk memenuhi standar pendidikan sekaligus menumbuhkan dan mengembangkan budaya mutu secara mandiri. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang bersifat praktis, partisipatif, dan berorientasi pada penguatan kapasitas sekolah.

Berdasarkan akar masalah tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini menawarkan solusi berupa pendampingan model pengelolaan sekolah berbasis siklus PPEPP. Pendampingan dirancang untuk membantu mitra memetakan kebutuhan mutu, memperkuat pemahaman warga sekolah mengenai PPEPP, mengintegrasikan setiap tahapan siklus ke dalam pengelolaan program, menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar pengendalian, serta menyusun tindak lanjut peningkatan mutu. Pendekatan pendampingan dipilih karena memberikan ruang bagi proses belajar bersama antara tim pelaksana dan mitra. Sekolah tidak ditempatkan sebagai objek kegiatan, tetapi sebagai mitra yang terlibat dalam mengidentifikasi masalah, merancang solusi, menerapkan perbaikan, melakukan refleksi, dan mengembangkan keberlanjutan program.

Pentingnya pendekatan pendampingan juga diperkuat oleh Maryadi (2021) yang menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan dapat meningkatkan kemampuan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS) dalam mengimplementasikan SPMI. Peningkatan tersebut mencakup pemahaman konsep SPMI, pemahaman tugas TPMPS, budaya mutu, pemetaan mutu, penyusunan perencanaan pemenuhan mutu, monitoring dan evaluasi, pelaksanaan pemenuhan mutu, serta penyusunan strategi peningkatan mutu. Temuan tersebut memberikan dasar empiris bahwa pendampingan dapat menjadi strategi yang relevan untuk memperkuat kapasitas internal sekolah dalam menerapkan sistem penjaminan mutu.

Kegiatan PkM ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SMP Negeri 6 Cilegon dalam mengelola peningkatan mutu secara sistematis melalui penerapan siklus PPEPP, memperkuat kemampuan warga sekolah dalam melakukan perencanaan dan evaluasi berbasis data, meningkatkan keterpaduan antara hasil evaluasi dengan tindak lanjut peningkatan mutu, serta membangun budaya mutu yang tercermin dalam kolaborasi, akuntabilitas, refleksi, dan perbaikan berkelanjutan. Secara khusus, kegiatan diarahkan agar kepala sekolah, TPMPS, guru, dan tenaga kependidikan memiliki

pemahaman dan keterampilan yang lebih baik dalam menerapkan setiap tahapan PPEPP serta mampu mengintegrasikannya ke dalam berbagai bidang pengelolaan sekolah.

Pelaksanaan kegiatan diharapkan menghasilkan beberapa luaran, antara lain meningkatnya kapasitas kepala sekolah, TPMPS, guru, dan tenaga kependidikan dalam menerapkan PPEPP; tersusunnya perangkat atau instrumen pendukung pengelolaan mutu; meningkatnya kemampuan sekolah dalam memanfaatkan data hasil evaluasi; serta terbentuknya mekanisme tindak lanjut yang dapat digunakan sebagai dasar peningkatan program secara berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan pendampingan ini tidak hanya diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan pengelolaan mutu pada saat kegiatan berlangsung, tetapi juga membangun kapasitas internal sekolah agar mampu melanjutkan proses peningkatan mutu secara mandiri. Pendekatan tersebut diharapkan dapat menjadi praktik baik yang adaptif dan dapat dikembangkan pada satuan pendidikan lain dengan karakteristik dan kebutuhan yang serupa.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini menggunakan pendekatan partisipatif dan pendampingan berbasis pemecahan masalah yang bertujuan meningkatkan kapasitas SMP Negeri 6 Cilegon dalam menerapkan pengelolaan sekolah berbasis siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Pendekatan partisipatif dipilih karena menempatkan mitra sebagai subjek yang terlibat aktif dalam mengidentifikasi kebutuhan, merumuskan permasalahan, menentukan solusi, melaksanakan kegiatan, serta melakukan refleksi terhadap hasil kegiatan. Pendekatan serupa telah digunakan dalam berbagai kegiatan PkM untuk pengembangan kapasitas warga sekolah melalui identifikasi kebutuhan, lokakarya, praktik, dan pendampingan. Gusnawaty et al. (2025) menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif melalui *focus group discussion*, workshop, dan pendampingan dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas profesional peserta sekaligus menghasilkan produk yang dapat diterapkan secara berkelanjutan.

Pendekatan pendampingan dalam kegiatan ini juga didasarkan pada kebutuhan untuk memperkuat kapasitas internal sekolah dalam mengimplementasikan sistem penjaminan mutu. Maryadi (2021) menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan dapat meningkatkan kemampuan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS) dalam memahami SPMI, melakukan pemetaan mutu, menyusun perencanaan pemenuhan mutu, mengembangkan instrumen monitoring dan evaluasi, memahami budaya mutu, melaksanakan pemenuhan mutu, serta menyusun strategi peningkatan mutu. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pendampingan merupakan strategi yang relevan untuk memperkuat kemampuan warga sekolah dalam menerapkan penjaminan mutu secara sistematis.

Sasaran kegiatan meliputi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS), guru, dan tenaga kependidikan yang memiliki keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu sekolah. Kegiatan dilaksanakan di SMP Negeri 6 Cilegon melalui serangkaian kegiatan koordinasi, lokakarya, praktik, pendampingan, monitoring, evaluasi, refleksi, dan penyusunan rencana tindak lanjut. Model kegiatan berupa workshop yang dilanjutkan dengan pendampingan juga memiliki relevansi dengan kegiatan penguatan SPMI. Lestari et al. (2023) melaporkan pelaksanaan workshop dan pendampingan penyusunan SPMI yang mengintegrasikan monitoring dan evaluasi serta pola PPEPP dalam pengembangan sistem penjaminan mutu.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan tahap identifikasi kondisi awal dan kebutuhan mitra. Identifikasi dilakukan melalui koordinasi dengan pihak sekolah, observasi terhadap praktik pengelolaan mutu, diskusi dengan kepala sekolah dan TPMPS, serta telaah dokumen pendukung, seperti dokumen SPMI, Rencana Kerja Sekolah (RKS), Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), program kerja sekolah, hasil evaluasi diri, laporan supervisi, dokumen monitoring dan

evaluasi, serta dokumen tindak lanjut peningkatan mutu. Identifikasi difokuskan pada keterlaksanaan lima tahapan PPEPP, yaitu penetapan standar dan indikator mutu, pelaksanaan program berdasarkan standar, evaluasi ketercapaian indikator, pengendalian melalui monitoring dan tindak lanjut, serta peningkatan mutu berdasarkan hasil evaluasi. Tahap identifikasi kebutuhan menjadi penting karena kegiatan PkM yang efektif perlu disusun berdasarkan kondisi dan permasalahan nyata yang dihadapi mitra. Mulyadi dan Efendi (2026), misalnya, menggunakan analisis kebutuhan sebagai tahap awal pendampingan kepemimpinan kepala sekolah yang kemudian dilanjutkan dengan workshop, implementasi, refleksi, serta monitoring dan evaluasi. Hasil identifikasi dalam kegiatan ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan kebutuhan pendampingan, materi kegiatan, serta strategi pemecahan masalah yang sesuai dengan kondisi SMP Negeri 6 Cilegon.

Tahap berikutnya adalah penguatan pemahaman melalui sosialisasi dan lokakarya mengenai SPMI, budaya mutu, pengelolaan sekolah unggul, dan implementasi siklus PPEPP. Kegiatan dilakukan secara interaktif melalui pemaparan materi, diskusi, studi kasus, identifikasi permasalahan, serta refleksi terhadap praktik pengelolaan mutu yang telah dilakukan sekolah. Peserta diarahkan untuk memahami bahwa PPEPP merupakan satu siklus yang saling berkaitan, sehingga hasil evaluasi harus digunakan sebagai dasar pengendalian dan peningkatan mutu pada tahap berikutnya. Hasulby et al. (2025) menjelaskan bahwa SPMI berkaitan dengan pengelolaan mutu yang dilakukan secara berkelanjutan melalui siklus PPEPP dan bahwa keberhasilannya dipengaruhi oleh kepemimpinan sekolah, keterampilan pengelola, serta budaya mutu. Tahap sosialisasi dan lokakarya juga digunakan untuk mengidentifikasi praktik baik, hambatan, dan kebutuhan penguatan kapasitas warga sekolah dalam mengimplementasikan penjaminan mutu secara berkelanjutan.

Tahap utama kegiatan berupa pendampingan implementasi siklus PPEPP dilakukan dengan prinsip *learning by doing*, yaitu peserta secara langsung mempraktikkan setiap tahapan PPEPP berdasarkan kondisi dan kebutuhan sekolah. Pada tahap penetapan, peserta didampingi dalam mengidentifikasi kebutuhan, menentukan prioritas, dan menetapkan indikator mutu. Pada tahap pelaksanaan, peserta diarahkan untuk menerjemahkan standar dan indikator mutu ke dalam program kerja sekolah serta memastikan pelaksanaannya sesuai dengan rencana. Pada tahap evaluasi, peserta didampingi dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data ketercapaian program untuk mengetahui kesenjangan antara target dan hasil. Selanjutnya, pada tahap pengendalian, peserta dibimbing dalam melakukan monitoring, menentukan tindakan korektif, dan menyusun tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi. Tahap peningkatan dilakukan melalui penyusunan inovasi, perbaikan program, penguatan kompetensi sumber daya manusia, dan perencanaan peningkatan mutu pada siklus berikutnya. Implementasi PPEPP sebagai siklus yang terintegrasi dalam pengelolaan mutu juga didukung oleh Prapsetyo et al. (2026) dan Al Jahra et al. (2026) yang menunjukkan bahwa standar mutu perlu ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan berdasarkan hasil evaluasi, dan ditingkatkan secara berkelanjutan dari satu siklus ke siklus berikutnya. Seluruh proses pendampingan dilaksanakan secara kolaboratif agar mekanisme yang dikembangkan sesuai dengan karakteristik dan kapasitas SMP Negeri 6 Cilegon.

Untuk memperkuat implementasi PPEPP, kegiatan dilanjutkan dengan praktik penyusunan dan penyempurnaan perangkat pendukung pengelolaan mutu. Peserta didampingi dalam menyusun atau memperbaiki matriks indikator mutu, instrumen monitoring, instrumen evaluasi, format analisis hasil evaluasi, dokumen pengendalian, serta rencana tindak lanjut peningkatan mutu. Produk yang dihasilkan ditelaah bersama oleh tim pelaksana dan mitra untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan sekolah. Proses revisi dilakukan secara partisipatif sehingga perangkat yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi dapat digunakan secara praktis dalam proses pengelolaan program dan peningkatan mutu sekolah. Pendekatan tersebut sejalan dengan temuan

Maryadi (2021) bahwa pendampingan SPMI dapat meningkatkan kemampuan sekolah dalam menyusun perencanaan pemenuhan mutu, program dan instrumen monitoring-evaluasi, serta strategi peningkatan mutu.

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui keterlaksanaan kegiatan serta perubahan kapasitas mitra setelah mengikuti pendampingan. Evaluasi menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Evaluasi kuantitatif dilakukan melalui *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur perubahan pemahaman peserta mengenai SPMI, PPEPP, budaya mutu, evaluasi berbasis data, dan tindak lanjut peningkatan mutu. Penggunaan *pre-test* dan *post-test* merupakan pendekatan yang lazim digunakan dalam evaluasi kegiatan PkM untuk mengidentifikasi perubahan pengetahuan atau keterampilan peserta setelah intervensi (Valianto et al., 2025). Gusnawaty et al. (2025), misalnya, melaporkan peningkatan kompetensi peserta melalui perbandingan hasil *pre-test* dan *post-test* setelah pelaksanaan program pengembangan kapasitas berbasis pendekatan partisipatif. Sementara itu, Hilmiana et al. (2026) menggunakan evaluasi *pre-test–post-test* berbasis observasi dalam kegiatan PkM di lingkungan sekolah untuk mengukur perubahan keterampilan peserta setelah intervensi.

Evaluasi kualitatif dilakukan melalui observasi, diskusi reflektif, telaah perangkat yang dihasilkan, dan umpan balik peserta. Data kuantitatif dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan skor sebelum dan sesudah kegiatan, sedangkan data kualitatif dianalisis dengan mengelompokkan temuan berdasarkan aspek pemahaman, keterampilan, implementasi PPEPP, partisipasi, dan keberlanjutan program. Keberhasilan kegiatan ditandai oleh adanya peningkatan pemahaman peserta, meningkatnya kemampuan dalam mengidentifikasi indikator mutu, tersusunnya perangkat pendukung PPEPP, meningkatnya kemampuan menggunakan data hasil evaluasi sebagai dasar pengambilan keputusan, serta tersusunnya mekanisme tindak lanjut peningkatan mutu. Pengukuran keberhasilan melalui perubahan kapasitas peserta dan produk yang dihasilkan juga sesuai dengan karakteristik evaluasi kegiatan PkM yang tidak hanya menilai keterlaksanaan kegiatan, tetapi juga perubahan pada mitra.

Tahap terakhir adalah refleksi dan penyusunan rencana tindak lanjut (RTL). Refleksi dilakukan bersama antara tim pelaksana dan mitra untuk mengidentifikasi perubahan yang telah dicapai, kendala yang masih dihadapi, praktik baik yang perlu dipertahankan, serta kebutuhan pengembangan program berikutnya. Berdasarkan hasil refleksi, sekolah menyusun RTL yang memuat program perbaikan, indikator keberhasilan, penanggung jawab, waktu pelaksanaan, sumber daya yang diperlukan, serta mekanisme monitoring dan evaluasi. RTL tersebut menjadi instrumen keberlanjutan agar penerapan PPEPP tetap dilaksanakan setelah kegiatan PkM selesai. Pendekatan refleksi dan tindak lanjut penting untuk memastikan bahwa hasil pendampingan tidak berhenti pada kegiatan pelatihan. Mulyadi dan Efendi (2026) juga menunjukkan bahwa pendampingan yang dilanjutkan dengan refleksi dan monitoring dapat memperkuat praktik manajemen sekolah secara lebih terstruktur dan berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan kegiatan tidak hanya diukur dari terlaksananya sosialisasi dan pendampingan, tetapi juga dari perubahan kapasitas mitra, kualitas perangkat pengelolaan mutu yang dihasilkan, kemampuan menerapkan PPEPP, serta kesiapan sekolah untuk melanjutkan proses peningkatan mutu secara mandiri dan berkelanjutan.

HASI DAN PEMBAHASAN HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Awal Mitra dan Identifikasi Permasalahan

Hasil identifikasi awal menunjukkan bahwa SMP Negeri 6 Cilegon telah memiliki berbagai program peningkatan mutu pada bidang kurikulum, kesiswaan, pendidik dan tenaga kependidikan, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, serta layanan khusus. Namun, hasil

observasi, diskusi dengan kepala sekolah dan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS), serta telaah dokumen menunjukkan bahwa keterpaduan antara penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu masih perlu diperkuat. Permasalahan utama bukan terletak pada tidak adanya kegiatan peningkatan mutu, tetapi pada belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar pengendalian dan penyusunan program peningkatan pada siklus berikutnya.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa sekolah telah memiliki praktik-praktik mutu, tetapi masih membutuhkan penguatan agar PPEPP menjadi siklus manajemen yang terintegrasi, bukan sekadar rangkaian kegiatan administratif. Kondisi ini memiliki kesesuaian dengan Pater et al. (2020) yang menemukan bahwa implementasi SPMI dapat berjalan efektif, tetapi masih menghadapi kendala dalam pelaksanaan PPEPP, termasuk dukungan sumber daya dan fasilitas bagi TPMPS. Temuan Ranisa et al. (2025) juga menunjukkan pentingnya implementasi SPMI secara sistematis dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Dengan demikian, penguatan dukungan kelembagaan dan keterpaduan setiap tahapan penjaminan mutu diperlukan agar PPEPP dapat berlangsung secara lebih efektif.

Dalam konteks kegiatan PkM ini, temuan tersebut menjadi dasar pemilihan pendampingan, bukan sekadar sosialisasi. Artinya, intervensi diarahkan untuk membantu mitra menghubungkan praktik yang telah berjalan dengan mekanisme PPEPP yang sistematis. Pendekatan tersebut sejalan dengan kegiatan workshop dan pendampingan SPMI yang dilaporkan Lestari et al. (2023), yang menggunakan workshop dan pendampingan untuk membantu mitra memahami dan mengembangkan sistem penjaminan mutu serta perangkat pendukungnya.

2. Peningkatan Pemahaman Mitra melalui Sosialisasi dan Lokakarya

Tahap sosialisasi dan lokakarya memberikan penguatan pemahaman kepada kepala sekolah, TPMPS, guru, dan tenaga kependidikan mengenai konsep SPMI, budaya mutu, dan siklus PPEPP. Kegiatan dilakukan melalui pemaparan interaktif, diskusi, studi kasus, identifikasi permasalahan sekolah, dan refleksi terhadap praktik mutu yang telah dilakukan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta mulai memahami hubungan antartahapan PPEPP secara lebih utuh, khususnya bahwa evaluasi bukan merupakan tahap akhir, tetapi menjadi dasar bagi pengendalian dan peningkatan mutu.

Perubahan pemahaman tersebut penting karena penjaminan mutu pada dasarnya merupakan proses yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan. Informasi resmi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan juga menjelaskan bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui proses merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan sehingga pada akhirnya mendukung terbentuknya budaya mutu (Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Lampung, 2026).

Hasil kegiatan ini juga memiliki kesamaan dengan PkM Valianto et al. (2025) di SMP Negeri 18 Medan. Kegiatan tersebut menggunakan edukasi SPMI melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan *pre-test* dan *post-test*, dan melaporkan peningkatan pengetahuan peserta setelah kegiatan. Dengan demikian, hasil PkM di SMP Negeri 6 Cilegon memperkuat temuan bahwa edukasi yang dilanjutkan dengan praktik dan pendampingan dapat menjadi strategi untuk meningkatkan kapasitas warga sekolah dalam memahami penjaminan mutu.

Perbedaannya, kegiatan di SMP Negeri 6 Cilegon tidak berhenti pada peningkatan pemahaman konseptual, tetapi dilanjutkan dengan pendampingan penerapan PPEPP pada berbagai bidang pengelolaan sekolah. Hal ini menjadi nilai tambah kegiatan karena peserta diarahkan untuk menerjemahkan konsep menjadi praktik pengelolaan mutu.

3. Implementasi PPEPP pada Tujuh Bidang Pengelolaan Sekolah

Hasil pendampingan menunjukkan bahwa siklus PPEPP dapat diintegrasikan ke dalam tujuh bidang pengelolaan sekolah, yaitu kurikulum, kesiswaan, pendidik dan tenaga kependidikan, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, serta layanan khusus.

Pada bidang kurikulum, PPEPP diterapkan melalui penetapan target pembelajaran dan program pengembangan kompetensi guru, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi melalui supervisi dan analisis hasil belajar, pengendalian melalui pendampingan dan perbaikan perangkat pembelajaran, serta peningkatan melalui inovasi pembelajaran dan pengembangan praktik baik. Pola tersebut menunjukkan bahwa evaluasi pembelajaran tidak berhenti pada pengukuran hasil, tetapi digunakan sebagai dasar perbaikan.

Pada bidang kesiswaan, siklus PPEPP diterapkan melalui penetapan program pembinaan, pelaksanaan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, evaluasi perkembangan peserta didik, pengendalian melalui pembinaan dan konseling, serta peningkatan melalui penyempurnaan program karakter dan prestasi. Pada bidang pendidik dan tenaga kependidikan, PPEPP diterapkan melalui analisis kebutuhan SDM, pelaksanaan pengembangan profesional, evaluasi kinerja, tindak lanjut berupa *coaching* dan *mentoring*, serta peningkatan kompetensi secara berkelanjutan.

Pada bidang keuangan, PPEPP diwujudkan melalui perencanaan anggaran berdasarkan prioritas mutu, pelaksanaan RKAS, evaluasi realisasi anggaran, pengendalian melalui monitoring dan pemeriksaan, serta peningkatan melalui penyempurnaan perencanaan anggaran berbasis kebutuhan. Pada bidang sarana dan prasarana, siklus tersebut diterapkan melalui pemetaan kebutuhan, pengadaan dan pemanfaatan, evaluasi kondisi aset, pengendalian melalui pemeliharaan, dan peningkatan fasilitas berdasarkan kebutuhan pembelajaran. Sementara itu, bidang humas menerapkan PPEPP melalui perencanaan kemitraan, pelaksanaan komunikasi dan kerja sama, evaluasi efektivitas hubungan dengan pemangku kepentingan, pengendalian terhadap permasalahan komunikasi, dan peningkatan jejaring. Pada layanan khusus, PPEPP diterapkan melalui perencanaan kebutuhan layanan, pelaksanaan berdasarkan SOP, evaluasi kepuasan pengguna, pengendalian kualitas pelayanan, serta peningkatan melalui penyempurnaan prosedur dan kompetensi petugas.

Temuan tersebut memperkuat konsep bahwa PPEPP tidak seharusnya ditempatkan sebagai kegiatan tambahan, tetapi menjadi mekanisme yang melekat pada seluruh proses manajemen sekolah. Pater et al. (2020) menunjukkan bahwa efektivitas SPMI berkaitan dengan proses implementasi yang sistematis serta dukungan terhadap TPMPS. Temuan Al Jahra et al. (2026) juga menunjukkan bahwa implementasi SPMI berbasis PPEPP dapat digunakan sebagai mekanisme peningkatan mutu melalui tahapan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan yang saling berkaitan. Studi Zahara et al. (2026) secara khusus mengkaji implementasi SPMI berbasis PPEPP dalam penguatan budaya mutu di SMPN 1 Kota Prabumulih, sehingga memberikan konteks yang sangat dekat dengan kegiatan pada SMP Negeri 6 Cilegon.

4. Pengembangan Perangkat Pendukung PPEPP

Salah satu hasil utama kegiatan adalah tersusunnya dan/atau tersempurnanya perangkat pendukung penerapan PPEPP, yang meliputi matriks indikator mutu, instrumen monitoring, instrumen evaluasi, format analisis hasil evaluasi, mekanisme pengendalian, dan rencana tindak lanjut. Hasil ini memperlihatkan bahwa pendampingan memberikan dampak lebih konkret dibandingkan kegiatan sosialisasi yang hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan. Mitra memperoleh perangkat yang dapat digunakan setelah kegiatan selesai.

Temuan ini sejalan dengan kegiatan Lestari et al. (2023) yang menggunakan kombinasi workshop dan pendampingan dalam pengembangan SPMI serta perangkat pendukungnya. Maryadi

(2021) juga menunjukkan bahwa pendampingan SPMI dapat memperkuat kemampuan sekolah dalam pemetaan mutu, penyusunan perencanaan pemenuhan mutu, pengembangan instrumen monitoring dan evaluasi, serta penyusunan strategi peningkatan mutu. Dengan demikian, kontribusi kegiatan PkM di SMP Negeri 6 Cilegon terletak pada upaya mengubah pemahaman PPEPP menjadi mekanisme kerja dan perangkat operasional yang dapat diterapkan dalam pengelolaan sekolah.

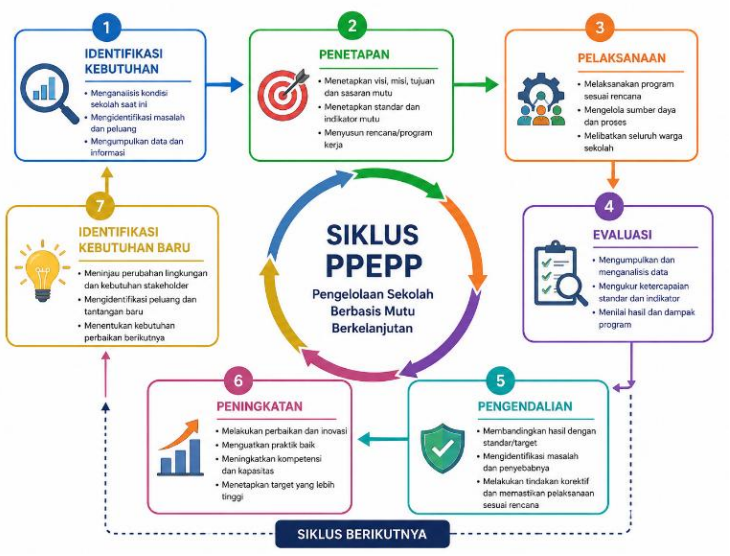
5. Penguatan Budaya Mutu melalui PPEPP

Hasil refleksi menunjukkan bahwa penerapan PPEPP mulai mendorong perubahan pola kerja warga sekolah. Budaya mutu terlihat melalui meningkatnya perhatian terhadap evaluasi program, penggunaan data dalam pembahasan, kolaborasi antarpelaksana, refleksi, dan penyusunan tindak lanjut. Kondisi tersebut sejalan dengan Afandi et al. (2025) yang menempatkan penguatan budaya mutu sebagai proses yang membutuhkan keterlibatan warga satuan pendidikan dan perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan. Secara teoretis, kondisi tersebut sesuai dengan konsep SPMI sebagai mekanisme penjaminan mutu yang dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan. Pater et al. (2020) secara khusus menempatkan implementasi SPMI sebagai bagian dari upaya mewujudkan budaya mutu sekolah. Temuan PkM ini juga memiliki relevansi kuat dengan studi Zahara et al. (2026) mengenai implementasi SPMI berbasis PPEPP dalam penguatan budaya mutu di SMPN 1 Kota Prabumulih. Studi tersebut secara khusus menempatkan PPEPP sebagai kerangka untuk menganalisis penguatan budaya mutu pada jenjang SMP.

Namun demikian, terdapat perbedaan penting. Studi Zahara et al. (2026) berorientasi pada analisis implementasi, sedangkan kegiatan di SMP Negeri 6 Cilegon berorientasi pada intervensi melalui pendampingan. Oleh karena itu, kontribusi kegiatan PkM ini bukan hanya mendeskripsikan bagaimana PPEPP diterapkan, tetapi juga membantu mitra memperkuat kapasitas dan perangkat untuk menerapkan PPEPP.

6. Integrasi PPEPP sebagai Model Pengelolaan Sekolah Unggul

Berdasarkan hasil kegiatan, model pengelolaan sekolah unggul berbasis PPEPP dapat dirumuskan sebagai suatu sistem yang menempatkan budaya mutu sebagai tujuan sekaligus penggerak, sementara tujuh bidang pengelolaan sekolah menjadi ruang implementasinya. Model tersebut dapat dirumuskan sebagaimana yang tersaji pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Integrasi PPEPP sebagai Model Pengelolaan Sekolah Unggul

Siklus tersebut diterapkan secara simultan pada pengelolaan kurikulum, kesiswaan, pendidik dan tenaga kependidikan, keuangan, sarana dan prasarana, humas, dan layanan khusus. Model ini sejalan dengan prinsip penjaminan mutu pendidikan yang menempatkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan sebagai proses yang berkelanjutan (Hasulby et al., 2025; Prapsetyo et al., 2026). Dengan demikian, kebaruan praktis kegiatan PkM ini terletak pada integrasi PPEPP ke dalam tujuh bidang pengelolaan sekolah dan penggunaan pendampingan sebagai strategi untuk mengubah PPEPP dari konsep penjaminan mutu menjadi mekanisme kerja sekolah.

7. Keberlanjutan Program

Keberlanjutan program diwujudkan melalui penyusunan rencana tindak lanjut yang melibatkan kepala sekolah, TPMPS, guru, dan tenaga kependidikan. RTL memuat program yang akan dilanjutkan, indikator keberhasilan, penanggung jawab, jadwal, sumber daya, serta mekanisme monitoring dan evaluasi. Strategi tersebut penting karena penguatan budaya mutu tidak dapat dicapai hanya melalui satu kali pelatihan. Hasil studi Pater et al. (2020) menunjukkan pentingnya dukungan kelembagaan, sumber daya, dan TPMPS dalam keberlanjutan implementasi PPEPP. Sementara pengalaman PkM di SMP Negeri 18 Medan juga merekomendasikan pelibatan lebih banyak pihak sebagai tindak lanjut implementasi SPMI (Valianto et al., 2025). Oleh karena itu, kegiatan di SMP Negeri 6 Cilegon diarahkan agar sekolah memiliki kapasitas internal, sehingga penerapan PPEPP dapat dilanjutkan tanpa ketergantungan terhadap tim pelaksana PkM.

8. Sintesis Hasil dan Kontribusi Kegiatan

Berdasarkan keseluruhan hasil dan pembahasan, kegiatan PkM ini menunjukkan bahwa pendampingan berbasis PPEPP dapat menjadi strategi untuk memperkuat kapasitas sekolah dalam membangun budaya mutu berkelanjutan. Hasil kegiatan tidak hanya berupa peningkatan pemahaman mengenai SPMI, tetapi juga mencakup kemampuan mengidentifikasi kebutuhan mutu, menerapkan siklus PPEPP, menyusun perangkat pendukung, menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar pengendalian, serta menyusun rencana peningkatan dan keberlanjutan.

Jika dibandingkan dengan hasil terdahulu, kegiatan ini memiliki tiga kontribusi utama. Pertama, temuan kegiatan memperkuat hasil Pater et al. (2020) bahwa implementasi SPMI dan PPEPP berperan dalam membangun budaya mutu. Kedua, kegiatan ini sejalan dengan Lestari et al. (2023) bahwa workshop yang dilanjutkan dengan pendampingan dapat membantu mitra mengembangkan perangkat dan mekanisme SPMI. Ketiga, hasil kegiatan memperkuat temuan PkM Valianto et al. (2025) bahwa edukasi SPMI dapat meningkatkan pemahaman warga sekolah apabila disertai evaluasi sebelum dan sesudah kegiatan.

Tabel 1. Keterkaitan Permasalahan, Tujuan, Solusi, dan Hasil Kegiatan PkM

No.	Permasalahan Mitra	Tujuan PkM	Bentuk Kegiatan/Solusi	Indikator Keberhasilan	Hasil Kegiatan
1	Pemahaman warga sekolah mengenai PPEPP belum sepenuhnya seragam dan belum dipahami sebagai satu siklus peningkatan mutu	Meningkatkan pemahaman kepala sekolah, TPMPS, guru, dan tenaga kependidikan tentang SPMI dan PPEPP	Sosialisasi, lokakarya, diskusi, studi kasus, dan refleksi	Peserta mampu menjelaskan fungsi dan keterkaitan lima tahapan PPEPP	Terjadi peningkatan pemahaman peserta mengenai konsep SPMI, budaya mutu, dan keterkaitan tahapan PPEPP

2	Perencanaan program mutu belum sepenuhnya terhubung dengan indikator mutu yang terukur	Meningkatkan kemampuan sekolah dalam menetapkan prioritas dan indikator mutu	Pendampingan identifikasi kebutuhan dan penyusunan indikator mutu	Tersusunnya prioritas dan indikator mutu yang relevan dengan kebutuhan sekolah	Sekolah mampu memetakan kebutuhan dan menetapkan indikator mutu sebagai dasar program
3	Pelaksanaan program mutu masih berpotensi berjalan secara parsial pada setiap bidang pengelolaan sekolah	Mengintegrasikan PPEPP ke dalam pengelolaan sekolah	Praktik *learning by doing* pada tujuh bidang pengelolaan sekolah	PPEPP diterapkan pada kurikulum, kesiswaan, PTK, keuangan, sarpras, humas, dan layanan khusus	Terbentuk pemahaman bahwa PPEPP dapat diterapkan pada seluruh bidang pengelolaan sekolah
4	Evaluasi program belum sepenuhnya menggunakan data sebagai dasar pengambilan keputusan	Meningkatkan kemampuan evaluasi berbasis data	Pendampingan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data mutu	Peserta mampu menggunakan data hasil evaluasi untuk mengidentifikasi kesenjangan	Sekolah mulai mengarahkan evaluasi program berdasarkan data dan indikator ketercapaian
5	Hasil evaluasi belum selalu diterjemahkan menjadi tindakan pengendalian	Meningkatkan kemampuan sekolah melakukan pengendalian mutu	Pendampingan monitoring, analisis kesenjangan, dan tindakan korektif	Tersusunnya mekanisme pengendalian dan tindak lanjut	Sekolah memiliki mekanisme monitoring dan tindakan korektif berdasarkan hasil evaluasi
6	Tindak lanjut peningkatan mutu belum sepenuhnya terdokumentasi dan berkelanjutan	Meningkatkan kemampuan menyusun program peningkatan mutu	Pendampingan penyusunan RTL	RTL memuat program, indikator, penanggung jawab, waktu, dan mekanisme monitoring	Tersusun rencana tindak lanjut peningkatan mutu untuk siklus berikutnya
7	Perangkat pendukung PPEPP belum sepenuhnya terintegrasi dalam pengelolaan program	Menghasilkan perangkat operasional PPEPP yang dapat digunakan sekolah	Penyusunan dan penyempurnaan matriks indikator, instrumen monitoring, evaluasi, pengendalian, dan RTL	Tersedianya perangkat pendukung PPEPP	Tersusun/tersempurnanya perangkat pengelolaan mutu yang dapat digunakan oleh TPMPS dan sekolah
8	Budaya mutu belum	Membangun budaya mutu	Pendampingan, refleksi,	Meningkatnya kolaborasi,	Mulai terbentuk

	sepenuhnya menjadi kebiasaan organisasi	yang berkelanjutan	kolaborasi, dan RTL	refleksi, akuntabilitas, dan komitmen perbaikan	budaya kerja yang lebih kolaboratif, reflektif, berbasis data, dan berorientasi perbaikan
9	Keberlanjutan program setelah kegiatan PkM belum memiliki mekanisme yang kuat	Membangun kapasitas internal sekolah agar mampu melanjutkan PPEPP secara mandiri	Refleksi akhir dan penyusunan mekanisme keberlanjutan	Adanya penanggung jawab, jadwal, indikator, dan mekanisme monitoring	Sekolah memiliki RTL dan mekanisme internal untuk melanjutkan siklus PPEPP

Tabel 2. Hasil Implementasi PPEPP pada Tujuh Bidang Pengelolaan Sekolah

No.	Bidang Pengelolaan	Penetapan	Pelaksanaan	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan
1	Kurikulum	KOSP, target pembelajaran, program kurikulum	Pembelajaran, supervisi, komunitas belajar	Analisis hasil belajar dan supervisi	Pendampingan guru dan perbaikan perangkat	Inovasi pembelajaran dan praktik baik
2	Kesiswaan	Program karakter, tata tertib, ekstrakurikuler	Pembinaan, ekstrakurikuler, BK, literasi	Evaluasi kehadiran, disiplin, prestasi	Konseling dan pembinaan	Pengembangan bakat, karakter, dan prestasi
3	Pendidik & Tenaga Kependidikan	Analisis kebutuhan dan pembagian tugas	Pelatihan, MGMP, komunitas belajar	Supervisi dan evaluasi kinerja	Coaching, mentoring, pendampingan	Pengembangan kompetensi berkelanjutan
4	Keuangan	RKAS dan prioritas anggaran	Pelaksanaan anggaran	Evaluasi realisasi dan laporan	Monitoring dan pemeriksaan	Perencanaan anggaran berbasis kebutuhan
5	Sarana & Prasarana	Pemetaan kebutuhan sarpras	Pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan	Inventarisasi dan pemeriksaan kondisi	Perbaikan dan pemeliharaan	Pengembangan sarpras pembelajaran
6	Humas	Program kemitraan dan komunikasi	Kerja sama dan publikasi	Evaluasi efektivitas kemitraan	Perbaikan komunikasi	Perluasan jejaring kemitraan
7	Layanan Khusus	Standar dan SOP layanan	Pelaksanaan layanan	Survei kepuasan dan monitoring	Perbaikan kualitas layanan	Inovasi dan peningkatan kualitas layanan

Tabel 3. Capaian Kapasitas Mitra Sebelum dan Sesudah Pendampingan

No.	Aspek yang Dinilai	Kondisi Awal	Intervensi PkM	Kondisi Setelah Pendampingan	Capaian
1	Pemahaman SPMI	Pemahaman belum seragam	Sosialisasi dan lokakarya	Peserta memahami prinsip SPMI	Meningkat
2	Pemahaman PPEPP	PPEPP belum dipahami sebagai satu siklus utuh	Lokakarya dan studi kasus	Peserta memahami hubungan P–P–E–P–P	Meningkat
3	Penetapan indikator mutu	Indikator belum sepenuhnya terintegrasi	Pendampingan penyusunan indikator	Indikator mutu lebih terarah	Meningkat
4	Evaluasi berbasis data	Pemanfaatan data belum optimal	Praktik analisis data	Data mulai digunakan untuk evaluasi	Meningkat
5	Pengendalian mutu	Tindak lanjut belum sistematis	Pendampingan monitoring dan tindakan korektif	Tersusun mekanisme pengendalian	Meningkat
6	Penyusunan RTL	Belum terdokumentasi secara optimal	Workshop RTL	RTL tersusun dengan indikator dan penanggung jawab	Meningkat
7	Penggunaan perangkat PPEPP	Perangkat belum terintegrasi	Penyusunan dan penyempurnaan instrumen	Perangkat dapat digunakan sekolah	Meningkat
8	Budaya mutu	Masih berorientasi pada pelaksanaan program	Refleksi dan pendampingan	Mulai berkembang budaya kolaborasi dan refleksi	Menguat
9	Keberlanjutan	Belum memiliki mekanisme yang kuat	Penyusunan RTL dan mekanisme monitoring	Sekolah memiliki rencana keberlanjutan	Menguat

PENUTUP

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), dapat disimpulkan bahwa pendampingan model pengelolaan sekolah berbasis siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) mampu memperkuat kapasitas SMP Negeri 6 Cilegon dalam mengelola peningkatan mutu secara lebih sistematis, partisipatif, dan berkelanjutan. Permasalahan mitra yang berkaitan dengan belum optimalnya keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan tindak lanjut mutu dapat direspons melalui rangkaian kegiatan identifikasi kebutuhan, sosialisasi, lokakarya, praktik, pendampingan, monitoring, evaluasi, refleksi, dan penyusunan rencana tindak lanjut.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya penguatan kemampuan kepala sekolah, Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS), guru, dan tenaga kependidikan dalam memahami dan menerapkan siklus PPEPP. Pendampingan melalui pendekatan learning by doing membantu mitra menerjemahkan konsep PPEPP ke dalam praktik pengelolaan pada tujuh bidang utama, yaitu

kurikulum, kesiswaan, pendidik dan tenaga kependidikan, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, serta layanan khusus. Dengan demikian, PPEPP tidak hanya dipahami sebagai konsep penjaminan mutu, tetapi mulai ditempatkan sebagai mekanisme kerja yang menghubungkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi berbasis data, tindakan pengendalian, dan peningkatan mutu.

Kegiatan PkM juga menghasilkan luaran berupa perangkat pendukung pengelolaan mutu, antara lain matriks indikator mutu, instrumen monitoring dan evaluasi, format analisis hasil evaluasi, mekanisme tindakan pengendalian, serta rencana tindak lanjut peningkatan mutu. Luaran tersebut memberikan manfaat praktis bagi mitra karena dapat digunakan sebagai instrumen untuk mendokumentasikan, memantau, dan menindaklanjuti proses peningkatan mutu setelah kegiatan pendampingan berakhir. Apabila hasil pre-test dan post-test telah tersedia, capaian peningkatan kapasitas mitra perlu ditampilkan secara kuantitatif untuk memperkuat bukti keberhasilan kegiatan.

Dari aspek keberlanjutan, pendampingan telah mendorong tumbuhnya budaya mutu yang ditandai dengan penguatan kolaborasi, refleksi, penggunaan data dalam pengambilan keputusan, akuntabilitas, dan komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan. Penyusunan rencana tindak lanjut menjadi bagian penting karena memungkinkan sekolah melanjutkan siklus PPEPP secara mandiri dan menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan program pada siklus berikutnya. Dengan demikian, keberhasilan PkM tidak hanya diukur dari terlaksananya kegiatan pendampingan, tetapi dari kemampuan mitra mempertahankan dan mengembangkan praktik peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Kegiatan ini memberikan sumbangan praktis bagi pengembangan PkM bidang manajemen dan penjaminan mutu pendidikan melalui pengembangan pendekatan pendampingan yang mengintegrasikan identifikasi masalah, penguatan kapasitas, praktik langsung, penyusunan perangkat mutu, evaluasi, refleksi, dan rencana keberlanjutan. Model tersebut dapat menjadi praktik baik yang adaptif bagi kegiatan PkM berikutnya pada satuan pendidikan dengan permasalahan serupa. Pengembangan selanjutnya dapat diarahkan pada pendampingan jangka menengah, pengukuran dampak secara longitudinal, penguatan digitalisasi instrumen PPEPP, serta replikasi model pada sekolah lain dengan karakteristik dan kebutuhan yang berbeda.

.

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, F., Sabila, N. S., Khumairoh, N., & Mu'alimin, M. (2025). Strategi penguatan budaya mutu di satuan pendidikan: Sintesis temuan utama dari literature review 2020–2025. Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam, 3(5), 200–206. https://doi.org/10.61132/jmpai.v3i5.1497

Al Jahra, F., Poluan, I. P., Khairani, S., Nurfadilla, & Prima, A. (2026). Implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) berbasis PPEPP dalam meningkatkan kinerja guru di SMKN 2 Sangatta Utara. SINOVA: Jurnal Ilmu Pendidikan & Sosial, 4(1), 19–30. https://doi.org/10.71382/sinova.v4i1.345

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Lampung. (2026, April 17). Penjaminan mutu pendidikan. https://bpmplampung.kemendikdasmen.go.id/public/penjaminan-mutu/penjaminan-mutu-pendidikan

Basuki, R. R., Rahmawati, D., Santoso, H., & Huda, S. A. (2026). School principals' leadership strategies in creating a quality culture: A systematic literature review in secondary education. Journal of Educational Sciences, 10(3), 221–237. https://doi.org/10.31258/jes.10.3.p.221-237

Gusnawaty, G., Lukman, L., Akhmar, A. M., & Nurwati, A. (2025). The MATTARU: Program pengembangan kapasitas guru SD dan kurikulum Bahasa Bugis melalui pendekatan partisipatif. Amal Ilmiah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 6(3), 679–691. https://doi.org/10.36709/amalilmiah.v6i3.665

Hasulby, N. A., Kartika, N., & Mustari, M. (2025). Manajemen kurikulum serta sistem penjaminan mutu internal (SPMI). Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI), 3(2), 393–400. https://doi.org/10.62017/jppi.v3i2.6592

Hilmiana, H., Lumbanraja, G. J., Mareva, A. S., Izzaddin, M. R., Dahlianingsih, V. F., Azhar, S., Iskandar, Y. U. D., Islam, R. H., & Alviani, D. (2026). Pendekatan partisipatif dalam kegiatan edukasi PHBS sebagai upaya peningkatan kesehatan siswa sekolah dasar di Desa Tegalgirang. Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia, 5(1), 495–502. https://doi.org/10.56303/jppmi.v5i1.1297

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025, November 9). Sistem penjaminan mutu internal (SPMI). Penjaminan Mutu Pendidikan. https://pmp.kemendikdasmen.go.id/implementasi/spmi

Lestari, D., Suwasono, P., Arief, M., Nasution, S. H., Suryani, A. W., Rahardjo, S., & Basuki, I. A. (2023). Workshop dan pendampingan penyusunan SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) oleh SPM Universitas Negeri Malang (UM) di Universitas Pawyatan Daha Kediri. Jurnal Pengabdian Masyarakat MIPA dan Pendidikan MIPA, 7(2), 77–82. https://doi.org/10.21831/jpmmp.v7i2.54401

Maryadi, B. (2021). Upaya peningkatan kemampuan TPMPS dalam mengimplementasikan SPMI melalui kegiatan pendampingan di sekolah binaan. Jurnal Metaedukasi: Jurnal Ilmiah Pendidikan, 3(2), 103–116. https://doi.org/10.37058/metaedukasi.v3i2.3589

Mulyadi, M., & Efendi, M. M. (2026). Pendampingan kepemimpinan kepala sekolah untuk penguatan manajemen SDM sekolah dasar. Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 9(3), 1094–1108. https://doi.org/10.31604/jpm.v9i3.1094-1108

Pater, I. M., Yudana, I. M., & Natajaya, N. (2020). Studi evaluasi implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dalam rangka mewujudkan budaya mutu. Jurnal Pedagogi dan Pembelajaran, 3(1), 95–103. https://doi.org/10.23887/jp2.v3i1.24364

Prapsetyo, A., Lestari, K., Raharjo, T., & Suparyana. (2026). Implementasi sistem penjaminan mutu internal berbasis PPEPP dalam pendidikan taruna Akademi Militer. Jurnal Mahatvavirya, 13(1), 42–48. https://doi.org/10.63824/jmp.v13i1.463

Purnamasari, I., Hadiansyah, H., Sulistiyana, S., & Suhaimi, S. (2026). Identifikasi kebutuhan pada peningkatan mutu pendidikan berbasis SPMI di SMK Negeri 2 Pelaihari. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (JPPI), 6(2), 1033–1047. https://doi.org/10.53299/jppi.v6i2.4004

Ranisa, S., Suriansyah, A., & Purwanti, R. (2025). Implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan, 4(2), 263–277. https://doi.org/10.55606/jimak.v4i2.4657

Samodro. (2017). Membangun budaya mutu satuan pendidikan melalui penerapan siklus sistem penjaminan mutu internal (SPMI) untuk pencapaian 8 standar nasional pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur. BORNEO: Jurnal Ilmu Pendidikan LPMP Kalimantan Timur, 11(1), 201–210.

Tristiandari, H., Nurhayati, R., & Haryati, T. (2025). Pengembangan budaya mutu sekolah: Studi kasus di SMP Negeri 1 Wirosari. IQRO: Journal of Islamic Education, 7(2), 483–497. https://doi.org/10.24256/iqro.v7i2.7470

Valianto, B., Tanjung, A. A., Darwin, Luthan, P. L. A., Kusuma, D. S. I., & Chaniago, E. N. S. (2025). Edukasi peningkatan mutu kinerja sekolah melalui sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di SMP Negeri 18 Medan. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 31(1), 90–94.

Zahara, E., Lasmita, T., Annur, S., & Karolina, A. (2026). Implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) berbasis siklus PPEPP dalam penguatan budaya mutu sekolah: Studi kasus di SMPN 1 Kota Prabumulih. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 4(2), 827–839. https://doi.org/10.61231/134ghh65